

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan suatu wilayah seringkali menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai standar dalam melihat kemajuan pembangunan pada wilayah tersebut. Hal ini karena dianggap bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan secara terus menerus, menggambarkan produktivitas pada suatu wilayah (Nursini, 2019; Tarigan, 2007). Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai output dari produktivitas individu. Sebagaimana Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* menyatakan bahwa, produktivitas individu melalui pembagian kerja menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Namun dibalik itu, pertumbuhan ekonomi harus dilihat lebih jauh dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas, bukan hanya sekadar pertumbuhan. Atas dasar ini, Amartya Sen memperkenalkan paradigma baru terkait pertumbuhan ekonomi melalui konsep *Development as Freedom*, yang mengubah fokus pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju peningkatan kapabilitas dan kebebasan manusia. Dikemukakan bahwa, pembangunan tidak hanya tentang peningkatan pendapatan nasional atau produk domestik bruto, melainkan tentang memperluas kebebasan dasar. Kebebasan ini meliputi lima aspek utama: kebebasan politik, fasilitas ekonomi, kesempatan sosial, jaminan transparansi, dan keamanan perlindungan. Dengan kata lain, pembangunan harus menciptakan kondisi di mana manusia memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam proses politik serta ekonomi secara merata (Amartya, 1999).

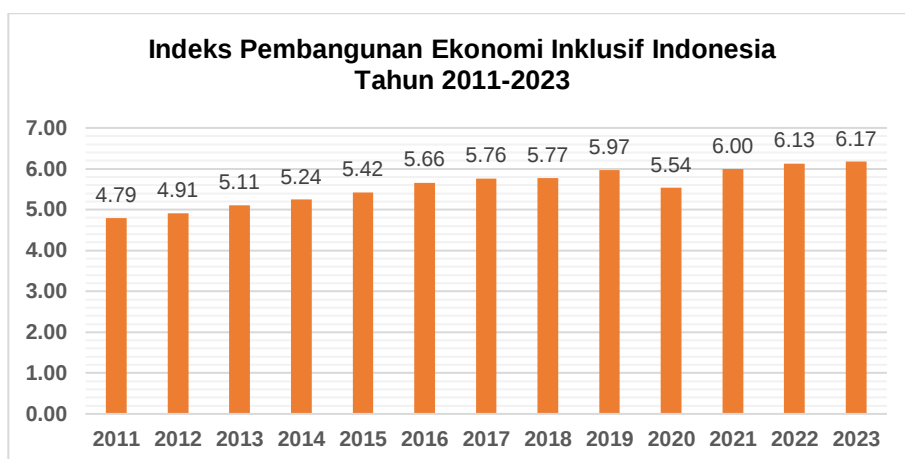
Sejalan dengan hal tersebut, Stiglitz (2002) dalam kritiknya terhadap globalisasi dan pembangunan ekonomi konvensional menyoroti pentingnya memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Konsep "globalisasi yang inklusif" diperkenalkan dimana institusi harus dirancang untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses ekonomi, dan mengatasi kegagalan pasar. Menekankan peran pemerintah dalam menyediakan barang publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Daron Acemoglu dan James Robinson, (2012) mendukung hal tersebut dengan semakin mempertegas bahwa keberlanjutan pembangunan hanya dapat dicapai jika suatu negara memiliki institusi inklusif yang memungkinkan inovasi, investasi, dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan tidak hanya membutuhkan perubahan ekonomi, tetapi juga transformasi pembangunan yang terdistribusi secara merata (Acemoglu & Robinson, 2012).

Berbagai teori ini sangat relevan dengan konsep pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Pembangunan ekonomi inklusif dirancang untuk menciptakan sebuah sistem yang mencakup pembangunan pada semua dimensi, dengan tujuan

utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan dapat dikatakan inklusif ketika seluruh anggota masyarakat dapat ikut berpartisipasi, berkontribusi dan mendapatkan manfaat tanpa membedakan latar belakang pribadi setiap masyarakat (Tambunan, 2016). Sehingga dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk menciptakan aksesibilitas dan kesempatan yang sama oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

Pembangunan ekonomi inklusif diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) dengan menggunakan tiga pilar utama sebagai indikator komposit yaitu pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Ketiga pilar ini digunakan karena dapat mewakili seluruh sektor dalam mengukur kualitas pembangunan suatu wilayah. Sebagaimana keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kemampuan wilayah dalam menciptakan pemerataan dan perluasan akses antar golongan (Dyah Hapsari et al., 2018).

Pilar pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi, yang mencakup subpilar pertumbuhan PDB per kapita, produktivitas tenaga kerja, tingkat pengangguran, serta tingkat investasi di berbagai sektor strategis, dan manufaktur. Pilar ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan dinamika perkembangan yang mendukung stabilitas jangka panjang. Pilar kedua adalah pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dengan subpilar yang meliputi tingkat ketimpangan pendapatan (gini rasio), persentase penduduk miskin, akses masyarakat rentan terhadap perlindungan sosial, serta upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Pilar ini menitikberatkan pada keadilan dalam distribusi hasil pembangunan agar manfaat ekonomi dirasakan secara merata. Pilar ketiga adalah perluasan akses dan kesempatan, yang meliputi subpilar akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, layanan keuangan formal, serta partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam pasar tenaga kerja. Pilar ini berfokus pada penghapusan hambatan struktural yang menghalangi berbagai kelompok masyarakat untuk memperoleh manfaat penuh dari pembangunan ekonomi (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023). Berikut ini merupakan pencapaian Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia tahun 2011-2023:



Gambar 1. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia Tahun 2011-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024

Pada **Gambar 1** merupakan kondisi pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia sejak tahun 2011-2023. Terlihat bahwa pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia pada dasarnya sudah mengalami peningkatan, walaupun peningkatan setiap tahunnya cenderung melambat. Hal ini disebabkan karena beberapa pilar maupun subpilar pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia memiliki peningkatan yang kurang maksimal tiap tahunnya, beberapa subpilar masih menjadi masalah serius dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Terbukti pada peningkatan IPEI di Indonesia, peningkatan IPEI dari tahun 2022 ke tahun 2023 hanya sebesar 0.04% poin, sangat kecil dibandingkan peningkatan dari tahun 2021-2022 yang mencapai 0.13% poin.

Masalah ini salah satunya disebabkan oleh pilar pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perekonomian. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2023 memiliki peningkatan yang lebih rendah dibandingkan pilar lainnya. Pada tahun 2023 hanya mencatatkan angka sebesar 5.63% poin, sedangkan Indikator lainnya mencatatkan angka di atas indeks pembangunan ekonomi inklusif nasional (6.17 persen) yaitu 6.95 persen untuk perluasan akses dan kesempatan, serta 6.62 untuk pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Angka ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tinggi belum menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia belum menjamin kesejahteraan dan kesempatan akses yang merata pada seluruh lapisan masyarakat. Masalah ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih dikuasi oleh beberapa kelompok tertentu. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh masyarakat kalangan atas, dan tidak menjangkau beberapa kelompok masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah (Ramadhan & Setiadi, 2019). Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan terbaru dari World Bank tahun 2023 yang menyatakan bahwa 10% orang Indonesia menguasai sekitar 70% dari seluruh kekayaan, dan satu persen diantara mereka menguasai separuh harta yang

ada. Oxfam, (2023) juga mengilustrasikan bahwa harta empat orang terkaya di Indonesia setara dengan akumulasi kekayaan 100 juta penduduk di Indonesia.

Masalah lainnya adalah pada keuangan inklusif di Indonesia. Dewan Nasional Keuangan Inklusi, (2023) menyebutkan bahwa pada sektor perbankan ketimpangan jurang kekayaan sangat parah. Sebanyak Rp4.231 triliun atau sekitar 53% dari total dana pihak ketiga perbankan yang mencapai Rp8.049 triliun hanya dimiliki oleh 0,02% populasi penduduk Indonesia. Data ini kembali menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum menciptakan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang menciptakan penurunan tingkat kemiskinan, penurunan angka pengangguran, pemerataan, dan kemudahan akses (Dyah Hapsari et al., 2018).

Data diatas didukung dengan kondisi pencapaian rasio gini di Indonesia. Badan Pusat Statistik, (2024) menyebutkan bahwa rasio gini Indonesia terakhir berada pada angka 0,379 persen poin. Walaupun berada di bawah 0,4% yang artinya masuk dalam kategori rendah, perbaikan yang dihasilkan setiap tahunnya tidak terlalu signifikan, tahun sebelumnya tercatat sebesar 0.388 persen poin, yang berarti hanya menurun 0.009 persen poin, angka yang sangat kecil. Begitupun tahun tahun sebelumnya, hanya berada pada kisaran angka tersebut. Data ini semakin meyakinkan pernyataan bahwa pembangunan di Indonesia belum menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Pembangunan ekonomi inklusif juga dapat diukur dengan melihat partisipasi antara laki laki dan perempuan dalam perekonomian. Pembangunan ekonomi inklusif dimaknai dengan tersedianya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk secara aktif berpartisipasi di sektor ekonomi (Renie, 2020). Hal ini belum tercapai di Indonesia secara maksimal. Indeks Ketimpangan Gender (GII) di Indonesia masih berada pada angka 0.447 persen poin, berada pada kategori sedang (0-029 rendah, 0.30-59 sedang, 0.60-100 tinggi). Artinya, meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam mengurangi ketimpangan gender, masih ada tantangan yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi (Ayuni et al., 2023).

Permasalahan gender di Indonesia juga dapat digambarkan dengan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender. Indonesia saat ini mencatatkan angka Indeks Global Gap Gender Report (GGGR) pada tahun 2023 sebesar 69,7 persen artinya baru 69,7 persen kesetaraan gender tercapai di Indonesia. Peringkat Indonesia adalah ke-7 dari 10 negara Asia Tenggara dan peringkat 92 dari 146 negara secara global berdasarkan nilai GGGI (World Economic Forum, 2023). Peringkat Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara Filipina, Singapura, Laos, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Padahal dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia mencatatkan angka 5,31% lebih unggul dibandingkan negara Singapura 3.8%, Laos 2.5%, Timor Leste 2.3%, dan Thailand hanya 2.6%. Hal ini kembali membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum menciptakan pembangunan ekonomi inklusif terkhusus pada pembangunan manusia yang responsif gender.

Pembangunan ekonomi inklusif dapat dikatakan efektif jika diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan terciptanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. *United Nation Development Programme* dalam *Human Development Report*, (2023) bahkan menyatakan bahwa, salah satu elemen penting dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang terdistribusi secara adil baik antar generasi, antar etnis, antar jenis kelamin, maupun antar wilayah. Untuk itu, pembangunan manusia responsif gender menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif (Dyah Hapsari et al., 2018). Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal peluang maupun hasil merupakan dimensi mendasar dari sebuah pembangunan manusia, hal ini yang masih belum tercipta secara maksimal di Indonesia.

Pembangunan ekonomi inklusif juga dapat dilihat pada pencapaian kualitas hidup manusia, yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dijadikan sebagai indikator penting dalam melihat pencapaian perbaikan kualitas hidup manusia (Setiawan et al., 2022). IPM memberikan gambaran sejauh mana wilayah mencapai sasaran, yang dilihat melalui angka harapan hidup yang tinggi, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak (Indarwati & Woyanti, 2023).

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2023, pada tahun 2022 IPM Indonesia berada di angka 73.77 persen dan pada tahun 2023 sebesar 74.39 persen, meningkat 0,62 poin atau 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Yang menjadi permasalahan adalah pencapaian IPM menurut jenis kelamin, walaupun mengalami peningkatan, ketimpangan pembangunan manusia antara laki laki dan perempuan masih terlihat. Pada tahun 2022 IPM perempuan sebesar 70.31 sedangkan laki-laki sebesar 76,73 atau terdapat ketimpangan sebesar 6,42 poin. Pada tahun 2023 IPM perempuan sebesar 70,96 sedangkan laki-laki sebesar 77,26 atau terdapat ketimpangan sebesar 6,3 poin. Angka ini menunjukkan bahwa walaupun terjadi perbaikan, pembangunan manusia responsif gender di Indonesia masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Pada sektor ketenagakerjaan, sepanjang tahun 2010-2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia selalu jauh di bawah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki laki. Fenomena tersebut terlihat pada tahun 2022, dimana TPAK laki-laki mencapai 83.87 persen sedangkan TPAK perempuan hanya 53.41 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki yang termasuk angkatan kerja sekitar 83 orang, sedangkan dari 100 penduduk usia kerja perempuan, sekitar 53 orang yang termasuk angkatan kerja. Walaupun sama sama mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022, kenaikan TPAK Laki laki jauh lebih besar dibandingkan TPAK Perempuan yaitu 1.6 persen poin untuk laki laki dan hanya 0.07 persen poin untuk perempuan. Hal ini kembali menunjukkan bahwa pembangunan manusia responsif gender dalam bidang ketenagakerjaan belum tercapai di Indonesia.

Data ini kembali di dukung dengan pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Indonesia. IPG Indonesia pada tahun 2023 sebesar 93,44 persen poin mengalami peningkatan (0,22 poin) dibandingkan tahun 2022 sebesar 93,22 persen poin. Peningkatan ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 0.36 poin (Badan Pusat Statistik, 2023). Begitupun pada pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender sebesar 76,59 di tahun 2022 menjadi 76,90 pada tahun 2023, meningkat sebesar 0.32 poin, namun tidak terlalu signifikan bahkan lebih rendah dibandingkan peningkatan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.33 poin (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini kembali membuktikan bahwa pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Indonesia belum maksimal.

Melihat beberapa permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia belum tercapai secara maksimal, walaupun sudah terjadi perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi. Masalah utamanya adalah pembangunan manusia yang responsif gender belum maksimal di Indonesia sehingga sumber daya manusia yang ada belum maksimal dalam mendukung pembangunan ekonomi di berbagai sektor. Padahal penggunaan sumber daya manusia yang lengkap dan lebih baik dapat mendorong pembangunan ekonomi (Esteve Volart & Berta, 2004).

Endogenous growth theory juga menjadikan sumber daya manusia sebagai varaibel utama dalam pembangunan. Teori yang dikemukakan oleh Paul Romer ini menyatakan bahwa pertumbuhan endogen berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kapasitas produktif. Diungkapkan bahwa ketika kualitas sumber daya manusia membaik, memiliki kesehatan yang baik, sekolah dan pendidikan yang baik, akan memberikan kontribusi pada perekonomian dalam jangka panjang. Selain itu, masyarakat yang lebih sehat dan produktif mengarah kepada standar hidup yang layak (Winarti, 2014).

Asumsi dari teori pertumbuhan endogen adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat memberikan pengaruh dalam perbaikan ekonomi eksternal. Salah satunya adalah, peran kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan Investasi. Sejalan dengan teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Gary Becker yang menyatakan bahwa perbaikan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan meningkatkan kualitas tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM dan teknologi menciptakan daya saing ekonomi yang kuat, meminimalkan risiko investasi, serta memperbesar peluang inovasi produk dan efisiensi produksi. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing, karena mereka melihat adanya prospek ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas institusional, dan potensi pasar yang terus berkembang (Schultz, 1961). Dengan memperkuat keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja, pembangunan sumber daya manusia dapat mengurangi ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan tenaga kerja (*skill mismatch*). Selain itu, peningkatan pendidikan individu tidak hanya meningkatkan peluang kerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja (Mincer, 1974).

Untuk itu, permasalahan dan perkembangan teori yang sudah di bahas sebelumnya perlu untuk dielaborasi dalam konsep pembangunan manusia yang responsif gender, melihat bagaimana kualitas sumber daya manusia baik laki laki dan perempuan mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif. Indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana pembangunan manusia responsif gender mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan pada dimensi pendidikan (rata rata lama sekolah perempuan dan laki laki), dimensi kesehatan (angka harapan hidup perempuan dan laki laki), dan dimensi ketenagakerjaan yang di ukur dengan penyerapan tenaga kerja perempuan dan laki laki. Investasi dijadikan sebagai variabel antara dalam melihat pengaruh pembangunan manusia responsif gender terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya yang sejalan dengan pembahasan ini adalah Ram et al. (2022) yang menyatakan bahwa ketika terjadi keseimbangan antara laki laki dan perempuan maka akan berdampak positif terhadap perekonomian. Begitupula Kim et al. (2016) yang menyatakan bahwa produktifitas perempuan yang tinggi berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu Minasyan et al. (2019), menyatakan bahwa kontribusi perempuan dalam pendidikan terutama dalam pendidikan formal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi perkapita.

Bertay et al. (2020), juga menjelaskan bahwa negara yang mempekerjakan lebih banyak wanita tumbuh relatif lebih cepat. Pada dimensi kesehatan, Indah (2020) menemukan bahwa perbaikan pada Angka Harapan Hidup Perempuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lofstrom (2008) juga menemukan bahwa kontribusi perempuan dalam pasar tenaga kerja berdampak positif pada perekonomian serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Sejalan dengan Akbulaev & Aliyeva (2020), bahwa kontribusi perempuan pada sektor sosial dan tenaga kerja dapat memperbaiki perekonomian. Begitupun yang dikemukakan oleh Elson et al. (n.d.), serta María Teresa et al. (2019) menyatakan bahwa, setiap pembangunan yang fokus pada perempuan akan memberikan kontribusi yang baik bagi struktur sosial dan perekonomian.

Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa asumsi ini tidak selalu sepenuhnya relevan. Penelitian menunjukkan bahwa durasi pendidikan formal dan perbaikan pada kesehatan tidak secara otomatis berkontribusi pada kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengangguran (Faritz & Soejoto, 2020; Pradipta & Dewi, 2020; Safitri, 2021; Silaban et al., 2020). Dalam beberapa konteks, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja (Dhiyaa'ulhaq et al., 2023; Direja & Paramitasari, 2022). Hal ini dipengaruhi oleh kesenjangan antara perbaikan pada kesehatan dan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan permasalahan keterampilan yang tidak sesuai dengan perkembangan industri (Akbulaev & Aliyeva, 2020; Kholis & Mugiyati, 2021; Laymonita & Basuki, 2023).

Berdasarkan beberapa penelitian ini, terdapat perbedaan pada hasil yang didapatkan, terjadi perdebatan yang menarik terkait hubungan antara pembangunan

manusia pada pendidikan dan kesehatan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif. Untuk itu, perlu melakukan sebuah penelitian lebih lanjut untuk membuktikan serta menemukan alasan yang tepat mengenai perbedaan yang terjadi pada penelitian sebelumnya. Penelitian terbaru juga diperlukan karena beberapa penelitian sebelumnya hanya fokus pada analisis hubungan kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi. Tidak pada pembangunan manusia yang responsif gender terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif. Penelitian hanya melihat hubungan secara langsung antara kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak pada pembangunan ekonomi yang menciptakan kesetaraan. Atas dasar ini, maka penelitian ini merupakan suatu kebaruan dalam kajian pembangunan manusia yang responsif gender di Indonesia, karena dapat melihat keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi yang inklusif. Adapun, judul dari penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Pembangunan Manusia Responsif Gender Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pembangunan manusia responsif gender berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan ekonomi Inklusif di Indonesia?
2. Apakah pembangunan manusia responsif gender berpengaruh secara tidak langsung melalui investasi terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia responsif gender berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pembangunan manusia responsif gender berpengaruh secara tidak langsung melalui investasi terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dalam strategi pencapaian kontribusi pembangunan gender dalam perekonomian, secara khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai pembangunan manusia yang responsif gender dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya

dengan mengangkat dan membahas tema atau sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pembaca.

1.5. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa alasan mengapa fokus pembahasan pada pembangunan manusia responsif gender menjadi penting. Yang paling mendasar adalah pembangunan manusia responsif gender merupakan pendekatan pembangunan yang tidak hanya menekankan peningkatan kualitas hidup manusia secara umum, tetapi juga secara khusus memperhatikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, akses, kontrol, dan manfaat dari hasil pembangunan. Konsep ini bertumpu pada gagasan bahwa pembangunan tidak akan adil dan efektif jika kelompok tertentu khususnya perempuan masih tertinggal dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Teori yang melandasi konsep ini dapat dijelaskan dalam *Human Development Theory* yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999) bahwa, tujuan pembangunan seharusnya adalah memperluas *capability* atau kemampuan dasar setiap individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk memperluas *capability* tersebut, karena jika perempuan tidak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, maka potensi pembangunan nasional menjadi tidak maksimal. UNDP (1995) dalam *Human Development Report: Gender and Human Development* menguatkan teori ini melalui pengembangan *Gender-related Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure* (GEM). Kedua indeks ini mempertegas pentingnya mengukur pembangunan manusia dengan memperhatikan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Hal ini menjadi dasar dari konsep pembangunan yang "responsif gender", yakni mampu mengenali dan mengatasi ketimpangan berdasarkan gender.

Gender and Development Theory (GAD) yang berkembang pada 1980-an juga mengemukakan hal tersebut, sebagaimana dipopulerkan oleh Caroline Moser (1989) bahwa, *gender and development theory* menggeser fokus dari sekadar memasukkan perempuan ke dalam pembangunan (*Women in Development*), menjadi bagaimana struktur pembangunan itu sendiri harus berubah agar responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan secara setara. Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Naila Kabeer (2003) bahwa, pembangunan yang responsif gender merupakan strategi krusial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, karena perempuan seringkali menghadapi hambatan struktural yang membuat mereka tertinggal dalam pembangunan. Maka, pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus secara aktif mengoreksi ketimpangan gender agar setiap orang, terlepas dari jenis kelaminnya, bisa berkontribusi dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Penelitian ini berpijak pada pemikiran bahwa pembangunan manusia yang responsif gender merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif. Untuk melihat pembangunan manusia secara responsif gender,

digunakan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, yang masing-masing direpresentasikan dalam variabel terpilah gender. Pemilihan indikator ini berakar dari *Human Development Theory* yang dipelopori oleh Amartya Sen (1999) yang dikembangkan lebih lanjut oleh UNDP melalui *Human Development Reports* sejak tahun 1990. Pendekatan ini memposisikan manusia sebagai subjek pembangunan, di mana peningkatan kualitas hidup (terutama melalui kesehatan dan pendidikan) menjadi tujuan utama sekaligus alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil. Pembangunan manusia perlu dilihat dari kemampuan (capabilities) dasar manusia: hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan, dan berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Sen menekankan pentingnya akses yang setara antara laki-laki dan perempuan terhadap semua capability tersebut agar pembangunan menjadi adil dan menyeluruh.

Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi kesehatan. Menurut Grossman (1972), kesehatan dipandang sebagai bentuk investasi dalam modal manusia yang meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi ekonomi. Dalam konteks gender, World Bank (2012) dalam *World Development Report: Gender Equality and Development* menyatakan bahwa, kesetaraan dalam kesehatan antara laki-laki dan perempuan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan partisipasi dan produktivitas perempuan.

Indikator rata-rata lama sekolah mencerminkan dimensi pendidikan. Pendidikan telah lama diakui sebagai komponen utama dalam *Human Capital Theory* yang dipopulerkan oleh Becker (1964). Becker menegaskan bahwa pendidikan meningkatkan kemampuan produktif individu dan mendorong inovasi dalam ekonomi. Secara khusus, Schultz (1961) dalam *Investment in Human Capital* menekankan bahwa peningkatan pendidikan perempuan membawa dampak lebih luas terhadap pembangunan karena berpengaruh terhadap generasi berikutnya dan kesehatan keluarga.

Indikator penyerapan tenaga kerja mencerminkan dimensi ekonomi dan partisipasi produktif. Hal ini didasarkan pada *Gender and Development Theory* (GAD) yang dikembangkan sejak 1980-an oleh para pemikir feminis seperti Caroline Moser (1989), menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi formal akan memperkuat struktur sosial dan mempercepat pembangunan yang inklusif. Dukungan empiris juga diberikan oleh Esteve-Volart (2004), yang menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi kerja perempuan berkorelasi positif dengan perekonomian regional.

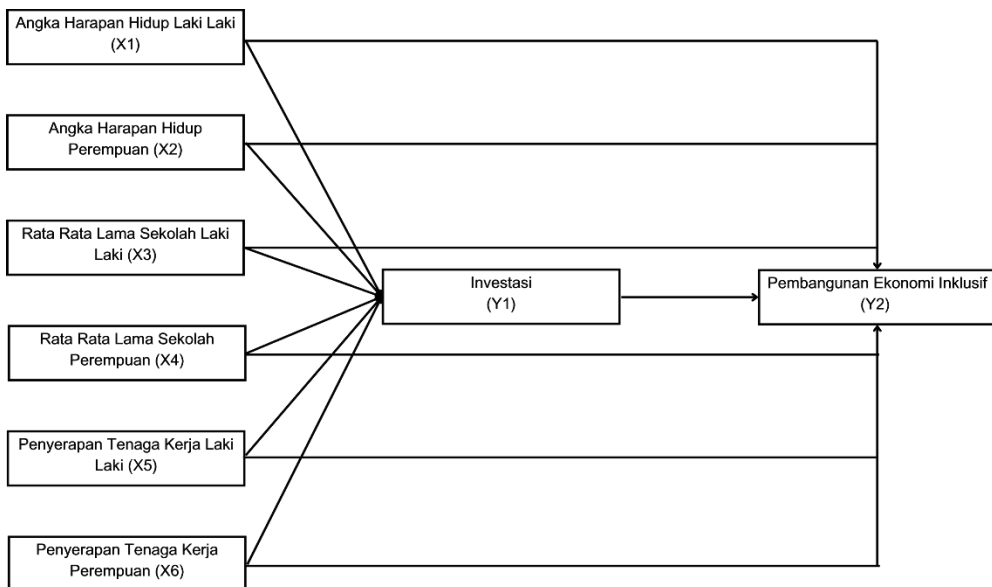
UNDP sebagai lembaga global pengembang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengenalkan GDI dan GII sebagai alat ukur untuk membedakan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia: kesehatan (life expectancy), pendidikan (harapan dan rata-rata lama sekolah), ketenagakerjaan (partisipasi dalam angkatan kerja). Terkait hal ini dalam *Human Development Report* (2010) disebutkan bahwa “capaian pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja, diukur berdasarkan jenis kelamin, memang merupakan indikator kuat pemberdayaan dan inklusi perempuan dalam pembangunan”. Dengan demikian, variabel yang digunakan sebagai indikator pembangunan manusia yang

responsif gender memiliki landasan teoritis dan digunakan secara global dalam pengukuran pembangunan manusia yang responsif gender.

Penelitian ini menggunakan variabel investasi sebagai variabel mediasi yang menjembatani pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi inklusif. Landasan teoretis yang mendasari hal ini adalah Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen oleh Paul Romer (1990), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber dari dalam sistem itu sendiri, terutama melalui akumulasi modal manusia dan teknologi. Ketika suatu wilayah memiliki SDM yang berkualitas maka akan meningkatkan daya tarik investasi karena menurunkan risiko produksi, menyediakan tenaga kerja terampil, dan memperluas basis konsumen. Hal ini diperkuat oleh Barro (1991), yang menemukan bahwa tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk berhubungan positif dengan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perkembangan teori tersebut, pentingnya pembangunan manusia responsif gender sebagai fondasi pembangunan ekonomi inklusif sangat ditekankan, sebagaimana ditegaskan dalam *Inclusive Growth Theory* yang dikembangkan oleh Rauniyar dan Kanbur (2010) bahwa, perekonomian hanya akan bersifat inklusif jika seluruh kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh manfaat yang setara dari pertumbuhan tersebut. Keterlibatan perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tidak hanya meningkatkan produktivitas secara makro, tetapi juga memperkuat fondasi sosial yang stabil dan berkelanjutan. OECD (2012), dalam *Promoting Growth in All Regions* juga menekankan bahwa pembangunan yang bersifat inklusif menuntut partisipasi aktif dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, serta memerlukan investasi yang tepat sasaran pada sektor yang produktif dan padat karya. Sehingga, keberadaan variabel yang merepresentasikan dimensi pembangunan manusia responsif gender dalam penelitian ini memiliki dasar teoritis yang kuat karena secara langsung mendukung prinsip-prinsip perekonomian yang inklusif.

Lebih jauh lagi, pembangunan ekonomi inklusif dipahami sebagai suatu proses yang menciptakan kesempatan ekonomi yang merata dan mendorong partisipasi produktif seluruh elemen masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Ali dan Son (2007) dalam laporan *Asian Development Bank* berjudul *Defining and Measuring Inclusive Growth* bahwa, pertumbuhan yang inklusif bergantung pada perluasan akses terhadap aset produktif dan layanan dasar, termasuk pendidikan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, penggunaan variabel investasi sebagai penghubung antara pembangunan manusia responsif gender dan pembangunan ekonomi inklusif dapat dijustifikasi secara teoritik. Investasi yang tumbuh akibat peningkatan kualitas SDM akan memperluas akses kesempatan ekonomi dan mendorong keterlibatan masyarakat secara merata. Dengan demikian, kerangka konseptual yang dapat menggambarkan keseluruhan hubungan ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka konseptual

Gambar kerangka konseptual di atas menunjukkan hubungan antara pembangunan manusia responsif gender, investasi, dan pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan manusia responsif gender direpresentasikan oleh enam indikator terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, serta penyerapan tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Keenam indikator tersebut mencerminkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang menjadi inti dari pendekatan pembangunan manusia yang responsif terhadap isu kesetaraan gender. Kerangka ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang berkualitas dan setara antara laki-laki dan perempuan mampu mendorong peningkatan investasi, yang dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel mediasi. Investasi yang tumbuh dari akumulasi modal manusia akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan yang menjamin pemerataan akses dan manfaat bagi seluruh kelompok masyarakat. Dengan demikian, kerangka ini menyusun secara sistematis bagaimana variabel-variabel tersebut saling memengaruhi dalam mendukung terciptanya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif.

1. Hubungan antara Variabel Dimensi Kesehatan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif

Kesehatan yang baik tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat dapat mengurangi beban ekonomi yang disebabkan oleh penyakit dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja (Frankena et al., 2019). Dengan demikian, kesehatan yang baik menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif.

Kesehatan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Individu yang sehat cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah di tempat kerja. Banyak studi menunjukkan bahwa peningkatan kesehatan masyarakat dapat meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi (Anu et al., 2022; Mohapatra & Giri, 2022; Tjodi et al., 2019; Tokal et al., 2023). Lebih lanjut, kesehatan yang baik dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indikator penting dari pembangunan ekonomi inklusif. IPM mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, dan kesehatan yang baik berkontribusi pada peningkatan IPM secara keseluruhan. Sebuah studi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap komponen IPM (Macura et al., 2022). Dengan meningkatkan kesehatan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Pendidikan yang baik tentang kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, yang dapat mengurangi beban penyakit dan meningkatkan produktivitas. Penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan kesehatan yang efektif dapat mengurangi angka kematian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Govindapuram et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi.

2. Hubungan antara Variabel Dimensi Pendidikan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pendidikan dan pembangunan ekonomi inklusif merupakan topik utama pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam konteks global saat ini. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan keterampilan individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi (Ambya, 2020). Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Salah satu aspek penting dari pendidikan dalam konteks pembangunan ekonomi inklusif adalah peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan yang baik mempersiapkan individu untuk memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebuah studi menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, karena semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kontribusi individu terhadap produktivitas ekonomi (Tjilen & Rediani, 2023)..

Pendidikan berkontribusi pada pembangunan manusia, yang merupakan indikator penting dari pembangunan ekonomi inklusif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, dan pendidikan memainkan peran kunci dalam meningkatkan IPM. Sebuah studi

menunjukkan bahwa alokasi dana untuk pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM dan pertumbuhan ekonomi (Torraco, 2018). Perbaikan pada kualitas pendidikan dapat menjadikan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendidikan yang berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa belanja pemerintah dalam sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif (Al-Hanawi et al., 2020). Hal ini karena, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pendidikan berkontribusi pada inovasi dan pengembangan teknologi, yang merupakan pendorong utama pembangunan ekonomi. Pendidikan tinggi, khususnya, berperan dalam menciptakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan inovasi baru. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kemampuan inovasi di sektor-sektor ekonomi, yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif (S. A. Asongu, 2018). Pendidikan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, individu lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun sebagai wirausaha. Pendidikan dapat mendorong individu untuk memulai usaha mereka sendiri, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (S. Asongu et al., 2020). Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan keterampilan, mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan berkontribusi pada pembangunan manusia, yang semuanya merupakan elemen penting dari pembangunan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata

3. Hubungan antara Variabel Dimensi Ketenagakerjaan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif

Penyerapan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi inklusif merupakan aspek penting dalam memahami dinamika ekonomi suatu negara. Penyerapan tenaga kerja yang efektif tidak hanya berkontribusi pada pengurangan pengangguran, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang baik dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana manfaat dari pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Kiak et al., 2022).

Penyerapan tenaga kerja yang baik berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang terus mengalami peningkatan akan mendorong pemerataan dan pembangunan ekonomi yang inklusif (Purnamawati, 2022). Dengan kata lain bahwa penyerapan tenaga kerja dapat berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan ekonomi (Kurniawan et al., 2022). Selain itu penelitian oleh Alekhina dan Ganelli, (2020) juga mendapatkan bahwa pertumbuhan

produktivitas tenaga kerja dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi inklusif melalui peningkatan pendapatan per kapita (Alekhina & Ganelli, 2020). Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja yang efektif tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan sosial dan ekonomi.

Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang baik juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa jika semua pekerja berkualitas terlibat dalam ekonomi, maka output barang dan jasa akan meningkat, yang pada gilirannya mendorong pembangunan ekonomi suatu wilayah (Gede Santanu & Kadek Dian Jati Wardani, 2023). Penyerapan tenaga kerja yang efektif dapat menciptakan kondisi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi.

Ketika ditinjau dalam konteks global, penyerapan tenaga kerja yang baik juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Penyerapan tenaga kerja dan akses terhadap pekerjaan yang layak dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (Syera et al., 2018). Dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, negara dapat mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja guna mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif.

4. Hubungan antara Variabel Investasi dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif.

Investasi memiliki peran fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui peningkatan akumulasi modal, investasi mampu memperluas kapasitas produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow (1956), investasi dianggap sebagai elemen utama dalam mendorong pertumbuhan output jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa adanya peningkatan dalam tabungan dan investasi domestik maupun asing. Hal ini diperkuat oleh Mankiw (2016), yang menyatakan bahwa investasi dalam modal fisik dan manusia merupakan pendorong utama bagi produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif mengacu pada pertumbuhan yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin, marginal, dan rentan. Ali dan Son (2007), menjelaskan bahwa inklusivitas mencakup akses terhadap kesempatan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial antar kelompok dan wilayah.

Investasi yang diarahkan secara strategis memiliki potensi besar dalam mendorong pemerataan pembangunan. Investasi publik dalam infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan pendidikan akan membuka akses ekonomi ke

daerah-daerah tertinggal dan memperkuat konektivitas nasional. Sementara itu, investasi swasta yang mengadopsi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Stiglitz dan Greenwald (2014) menekankan pentingnya investasi yang tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan pemerataan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, investasi inklusif menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Selain pemerataan wilayah, investasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Dengan memberikan akses terhadap modal, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur pendukung, investasi mampu memberdayakan kelompok tersebut untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. UNCTAD (2020) dalam laporan *World Investment Report: International Production Beyond the Pandemic* menekankan bahwa investasi yang berpihak pada kelompok rentan akan memperkuat kohesi sosial dan memperluas basis pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, orientasi investasi ke arah pemberdayaan sosial menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif.

Sehingga dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional, konvergensi antara strategi investasi dan prinsip pembangunan inklusif menjadi sangat krusial. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu merancang insentif dan regulasi yang mendorong alokasi investasi ke sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Zhuang et al., menekankan pentingnya kebijakan investasi yang berpihak kepada masyarakat bawah untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, investasi tidak hanya dilihat sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan manusia.

Berdasarkan uraian teoritis dan kajian empiris yang mendalam mengenai hubungan variabel yang sudah dijelaskan, maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Diduga angka harapan hidup laki-laki berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
- H2 : Diduga angka harapan hidup perempuan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
- H3 : Diduga rata-rata lama sekolah laki-laki berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
- H4 : Diduga rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
- H5 : Diduga penyerapan tenaga kerja laki-laki berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.
- H6 : Diduga penyerapan tenaga kerja perempuan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia.

- H7 : Diduga angka harapan hidup laki-laki berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui investasi di Indonesia.
- H8 : Diduga angka harapan hidup perempuan berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui investasi di Indonesia.
- H9 : Diduga rata-rata lama sekolah laki-laki berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui investasi di Indonesia.
- H10 : Diduga rata-rata lama sekolah perempuan berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui investasi di Indonesia.
- H11 : Diduga penyerapan tenaga kerja laki-laki berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui investasi di Indonesia.
- H12 : Diduga penyerapan tenaga kerja perempuan berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi inklusif melalui investasi di Indonesia.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data yang berasal dari variabel yang menjadi faktor-faktor atau indikator ketercapaian pembangunan manusia responsif gender yaitu dimensi kesehatan (angka harapan hidup perempuan dan angka harapan hidup laki laki), dimensi pendidikan (rata rata lama sekolah perempuan, dan rata rata lama sekolah laki laki), dimensi ketenagakerjaan (penyerapan tenaga kerja laki laki dan penyerapan tenaga kerja perempuan). Data tersebut akan dikaitkan dengan data tingkat investasi dan pembangunan ekonomi inklusif pada tahun 2011 sampai 2023 di Indonesia.

Data dikumpulkan dengan menggunakan data panel yakni gabungan data provinsi yang ada di Indonesia (cross section) yang dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinyu (time series). Data panel adalah gabungan antara data silang (cross section) dan data runtut waktu (time series) yang memungkinkan untuk menganalisis perubahan variabel pada subjek yang sama dalam beberapa periode waktu (D. N. Gujarati, 2006). Data diperoleh melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

2.2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur (Path Analysis) menggunakan data panel, yaitu kombinasi analisis deret waktu (*time-series data*) berupa data tahun 2011-2023 dan deret unit (*unit-section data*) berupa data 34 provinsi di Indonesia. Analisis jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel. Model ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung sejumlah variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan software eviews sebagai alat dalam menganalisis data. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan persamaan simultan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembangunan ekonomi inklusif dengan Investasi sebagai variabel penghubung/mediasi.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel angka harapan hidup perempuan, angka harapan hidup laki laki, rata rata lama sekolah perempuan, rata rata lama sekolah laki laki, penyerapan tenaga kerja perempuan dan penyerapan tenaga kerja laki laki.

Model yang digunakan dapat diformulasikan dalam dua persamaan sebagai berikut:

Persamaan 1:

$$Y_{1it} = f(X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}, X_{4it}, X_{5it}, X_{6it})$$

Persamaan 2:

$$Y_{2it} = f(X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}, X_{4it}, X_{5it}, X_{6it}, Y_{1it})$$

Berdasarkan hubungan fungsional di atas kemudian dijabarkan dalam persamaan substruktur sebagai berikut:

Persamaan 1:

$$Y_{1it} = a_0 + a_1X_{1it} + a_2X_{2it} + a_3X_{3it} + a_4X_{4it} + a_5X_{5it} + a_6X_{6it} + \varepsilon_0$$

Persamaan 2:

$$Y_{2it} = \beta_0 + \beta_1X_{1it} + \beta_2X_{2it} + \beta_3X_{3it} + \beta_4X_{4it} + \beta_5X_{5it} + \beta_6X_{6it} + \beta_7Y_{1it} + \varepsilon_1$$

Mensubstitusi persamaan 1 kepersamaan 2

$$Y_{2it} = \beta_0 + \beta_1X_{1it} + \beta_2X_{2it} + \beta_3X_{3it} + \beta_4X_{4it} + \beta_5X_{5it} + \beta_6X_{6it} + \beta_7(a_0 + a_1X_{1it} + a_2X_{2it} + a_3X_{3it} + a_4X_{4it} + a_5X_{5it} + a_6X_{6it} + \varepsilon_0) + \varepsilon_1$$

$$Y_{2it} = \beta_0 + \beta_1X_{1it} + \beta_2X_{2it} + \beta_3X_{3it} + \beta_4X_{4it} + \beta_5X_{5it} + \beta_6X_{6it} + \beta_7a_0 + \beta_7a_1X_{1it} + \beta_7a_2X_{2it} + \beta_7a_3X_{3it} + \beta_7a_4X_{4it} + \beta_7a_5X_{5it} + \beta_7a_6X_{6it} + \varepsilon_0 + \varepsilon_1$$

Sehingga ditemukan persamaan *reduce form* sebagai berikut:

$$Y_{2it} = \delta_0 + \delta_1X_{1it} + \delta_2X_{2it} + \delta_3X_{3it} + \delta_4X_{4it} + \delta_5X_{5it} + \delta_6X_{6it} + u_{it}$$

Keterangan:

X_1	= Angka harapan hidup laki laki
X_2	= Angka harapan hidup perempuan
X_3	= Rata rata lama sekolah laki laki
X_4	= Rata rata lama sekolah perempuan
X_5	= Penyerapan tenaga kerja laki laki
X_6	= Penyerapan tenaga kerja perempuan
Y_1	= Investasi
Y_2	= Pembangunan ekonomi inklusif
$a_0, \beta_0, \delta_0 \dots$	= Intersep
$\varepsilon_0, \varepsilon_1 \dots$	= Error term
i	= data <i>cross-section</i> (34 provinsi)
t	= data <i>time series</i> (tahun 2011-2023)

Sehingga diperoleh hasil *reduce form* di atas adalah sebagai berikut:

$\delta_0 = \beta_0 + \beta_7a_0$	= Konstanta
$\delta_1 = \beta_1 + \beta_7a_1$	= Pengaruh angka harapan hidup laki-laki terhadap pembangunan ekonomi inklusif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi
$\delta_2 = \beta_2 + \beta_7a_2$	= Pengaruh angka harapan hidup perempuan terhadap pembangunan ekonomi inklusif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi
$\delta_3 = \beta_3 + \beta_7a_3$	= Pengaruh rata rata lama sekolah laki-laki terhadap pembangunan ekonomi inklusif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi
$\delta_4 = \beta_4 + \beta_7a_4$	= Pengaruh rata rata lama sekolah perempuan terhadap pembangunan ekonomi inklusif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi
$\delta_5 = \beta_5 + \beta_7a_5$	= Pengaruh penyerapan tenaga kerja laki laki terhadap pembangunan ekonomi inklusif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi

$\delta_6 = \beta_6 + \beta_7 a_6$ = Pengaruh penyerapan tenaga kerja perempuan terhadap pembangunan ekonomi inklusif baik secara langsung maupun tidak langsung melalui investasi

$u_{it} = \varepsilon_0 + \varepsilon_1$ = Error term

Berdasarkan hasil *reduced form* di atas, baik dari variabel eksogen maupun variabel endogen terhadap pembangunan ekonomi inklusif dapat diidentifikasi. Persamaan di atas akan dianalisis menggunakan data panel dengan terlebih dahulu menentukan model yang akan digunakan, beberapa model yang dapat digunakan yaitu:

1. *Common Effect Model*

Teknik ini sama pada analisis data *cross section* dan *time series* karena mengasumsikan bahwa koefisien *intercept* dan *slopenya* sama (konstan) untuk setiap data *cross section* dan *time series*. Dengan kata lain model ini tidak memperhatikan dimensi individu dan waktu. Namun, untuk melakukan regresinya perlu menggabungkan data *cross section* dan *time series* yang biasa disebut *pool data*.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Teknik Model Efek Tetap (*Fixed Effect*) sudah memasukkan efek dimensi individu dan waktu. Pada model ini efek dimensi individu dan waktu terletak pada *intercept* dan *slope* pada model. Sehingga pada model ini menganggap bahwa yang sangat mempengaruhi variabel dependen adalah *slope* dan *intercept*.

3. *Random Effect Model (REM)*

Teknik ketiga ini hampir sama dengan Model *Fixed Effect* karena memasukkan efek dimensi individu dan waktu. Namun model ini beranggapan bahwa efek dimensi tersebut terletak pada *error* dari model.

Untuk mengetahui model yang tepat maka digunakan beberapa teknik pengujian yaitu:

1. Uji Chow Test

Uji Chow digunakan dalam menentukan model terbaik untuk digunakan dalam suatu penelitian. Terdapat dua pilihan untuk mengetahui model terbaik pada uji chow yaitu model *fixed effect* dan model *common effect*. Hipotesis pada uji Chow sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Ketika hasil uji chow menghasilkan probabilitas *chi-square* lebih dari 0,05 maka model yang digunakan adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas *chi-square* yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka model yang digunakan adalah *fixed effect*. Jika model yang terpilih adalah *fixed effect* maka perlu dilanjutkan dengan uji Hausman Test. Uji Hausman Test digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik dari *random effect*.

2. Uji Hausman Test

Hausman Test merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik dari model *random effect*. Dengan mengikuti kriteria

Wald nilai uji Hausman Test mengikuti angka *Chi-square*. Hipotesis pada uji hausman test sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

H_0 ditolak jika nilai statistik Hausman lebih besar daripada nilai kritis statistik chi-square. Hal ini berarti bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *fixed effect*. Apabila pada uji Hausman test hasilnya tidak menolak H_0 maka model yang sebaiknya digunakan adalah model *random effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM test)

Uji LM test merupakan model yang digunakan untuk mengetahui apakah uji *random effect* lebih baik dibandingkan dengan uji model *common effect*. Uji LM Test uk menguji signifikansi pada moodel *random effect* yang didasarkan pada nilai residual dari model *common effect*. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Random Effect*

Uji LM di dasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* dari jumlah variabel independen, sehingga jika nilai LM lebih besar dari nilai *chi-square* atau *t* kritis maka hipotesisnya menolak H_0 sehingga model yang tepat adalah model *random effect*. Sebaliknya jika nilai LM lebih kecil dari nilai *chi-square* atau *t* kritis maka hipotesisnya menerima H_0 sehingga model yang tepat adalah *common effect model*. Setelah model sudah ditentukan maka dapat dilanjutkan dengan pengujian variabel-variabel dalam penelitian menggunakan uji asumsi klasik.

2.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu analisis diterapkan pada sebuah data. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan model regresi yang digunakan menunjukkan persamaan hubungan yang valid atau BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Model yang digunakan harus memenuhi asumsi-asumsi dasar klasik *Two Stage Least Square* (2SLS). Asumsi yang digunakan adalah tidak terjadi multikolinieritas yang berarti adanya hubungan antara variabel bebas, tidak ada heteroskedastisitas yang berarti adanya varian yang tidak konstan dari variabel pengganggu (D. N. Gujarati & Porter, 2010).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan linear yang kuat antara variabel independen, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Jika multikolinearitas terjadi, koefisien regresi dapat menjadi tidak stabil dan interpretasi hasil analisis menjadi sulit untuk dianalisis (Farah Nurul Andini & Lisnur Wachidah, 2023).

Sementara itu, uji heteroskedastisitas berfungsi untuk mengidentifikasi apakah varians dari residual model regresi tidak konstan. Ketidakkonsistenan ini dapat mengakibatkan estimasi yang tidak efisien dan dapat mempengaruhi validitas inferensi statistik, seperti uji *t* dan uji *F*. Dalam konteks data panel, di mana data

dikumpulkan dari beberapa entitas selama periode waktu tertentu, penting untuk memastikan bahwa kedua asumsi ini terpenuhi agar model regresi yang dihasilkan dapat diandalkan (Mustofa & Violeta, 2023).

2.3.1. Uji Multikolinearitas

Menurut (I. Gozhali & Fuad, 2008) uji multikolineritas bertujuan untuk membuktikan apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antarvariabel independen tidak terjadi kolerasi. Oleh karena itu masalah multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linier sederhana yang hanya melibatkan satu variable independen. Persamaan regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika tingkat korelasi antarvariabel independen kurang dari 0,95 (D. N. Gujarati & Porter, 2010).

2.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Munculnya heteroskedastisitas disebabkan karena residual dari model regresi yang diamati memiliki varian yang tidak konstan dari satu observasi ke observasi lain (Hasan & Iqbal, 2002). Ini berarti heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Salah satu asumsi penting dalam model OLS atau TSLS atau regresi sederhana adalah varian bersifat homoskedastisitas. Variabel yang digunakan muncul gangguan apabila data yang diamati berfluktuasi sangat tinggi.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian, digunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* yang apabila probabilitas $\text{Obs} \times \text{R-Square} > \alpha$ ($\alpha = 0,05\%$) maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya jika probabilitas $\text{Obs} \times \text{R-Square} < \alpha$ ($\alpha = 0,05\%$) maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Selain itu, dapat menggunakan uji Gletser dengan melihat nilai probabilitas dari setiap variabel Independen, apabila probabilitas $> \alpha$ ($\alpha = 0,05\%$) maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya jika probabilitas $< \alpha$ ($\alpha = 0,05\%$) maka terdapat gejala heteroskedastisitas.

2.4. Devinisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan variabel yang ingin diteliti. Adapun definisi operasional varibel dalam penelitian ini adalah:

1. Pembangunan ekonomi inklusif adalah proses pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, pembangunan ekonomi inklusif diukur menggunakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang dikembangkan oleh BAPPENAS. Data IPEI diperoleh untuk seluruh provinsi di Indonesia pada periode 2011–2023, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
2. Investasi adalah pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal, meningkatkan kapasitas produksi atau mendukung pertumbuhan ekonomi

untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, dalam penelitian ini investasi yang dimaksud adalah realisasi investasi atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2011-2023 (dalam satuan rupiah) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

3. Angka harapan hidup laki laki adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang anak laki laki sejak lahir. Data yang digunakan adalah data seluruh provinsi di Indonesia tahun 2011-2023 (dalam tahun) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
4. Angka harapan hidup perempuan adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang anak perempuan sejak lahir. Data yang digunakan adalah data seluruh provinsi di Indonesia tahun 2011-2023 (dalam tahun) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
5. Rata-rata lama sekolah laki-laki adalah waktu rata-rata yang ditempuh penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan formal. Data yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah laki-laki di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022 dalam satuan tahun.
6. Rata-rata lama sekolah perempuan waktu rata-rata yang ditempuh penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan formal. Data yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah perempuan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022 dalam satuan tahun.
7. Penyerapan tenaga kerja laki-laki adalah penduduk laki-laki yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, diukur sebagai proporsi jumlah laki-laki yang bekerja terhadap total angkatan kerja laki-laki. Data yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja laki-laki di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022 dalam satuan persen.
8. Penyerapan tenaga kerja perempuan adalah penduduk perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, diukur sebagai proporsi jumlah perempuan yang berkerja terhadap total angkatan kerja perempuan. Data yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja perempuan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2022 dalam satuan persen.